



Kontribusi Mahasiswa dalam Membangun Ekosistem Kampus Berintegritas melalui Penguatan Pendidikan Antikorupsi dan Implementasi Strategi ACTION

Salsabila Fatmawati¹, Yushitha Krismawati², Amel Zakiah³

^{1,2,3}Universitas Siliwangi, Indonesia

E-mail: salsabilafatmawati7@gmail.com¹, yushithakrismawati8@gmail.com²,
amelzakiah024@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received November 10, 2025

Revised November 15, 2025

Accepted November 20, 2025

Keywords:

Students, Anti-Corruption,
Integrity, Digital Transparency,
ACTION Strategy

ABSTRACT

The higher education environment still reveals various forms of unethical behavior, ranging from academic dishonesty to the lack of transparency in student organization management. Field evidence shows practices such as cheating, plagiarism, data manipulation, budget mark-ups, and illicit fees in campus administrative services, indicating that a culture of integrity has not yet been firmly established. This issue arises because anti-corruption education has not been fully internalized, while students' contributions in monitoring, transparency, and collaboration remain partial. This study employs a descriptive qualitative method through a literature-based approach, collecting relevant academic sources, documents, and research on students' roles in corruption prevention. Data analysis was conducted using content analysis through reduction, categorization, conceptual synthesis, and source triangulation to strengthen the validity of findings. The results reveal four major forms of student contribution: strengthening personal integrity by rejecting dishonest practices, acting as social controllers of administrative irregularities, utilizing digital technology to enhance financial transparency within student organizations, and initiating early-stage collaborations with university stakeholders in integrity campaigns. The study concludes that the implementation of the ACTION Strategy serves as a relevant framework for reinforcing anti-corruption culture; however, institutional support is required to ensure that integrity practices can be internalized and normalized sustainably within the campus environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 10, 2025

Revised November 15, 2025

Accepted November 20, 2025

Kata Kunci:

Mahasiswa, Antikorupsi,
Integritas, Transparansi Digital,
Strategi ACTION

ABSTRAK

Kondisi lingkungan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa perilaku tidak berintegritas masih muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kecurangan akademik hingga ketidaktransparanan pengelolaan organisasi mahasiswa. Fakta lapangan memperlihatkan adanya praktik menyontek, plagiasi, manipulasi data, mark-up dana kegiatan, dan pungutan liar dalam layanan administrasi kampus, sehingga menunjukkan bahwa budaya integritas belum terbentuk secara kuat. Masalah ini muncul karena internalisasi pendidikan antikorupsi belum berjalan optimal, sementara kontribusi mahasiswa dalam pengawasan, transparansi, dan kolaborasi masih bersifat parsial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menghimpun literatur, dokumen, serta hasil penelitian terkait peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan tahapan reduksi, kategorisasi, sintesis konseptual, dan triangulasi sumber untuk memperkuat keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan empat kontribusi



utama mahasiswa, yaitu penguatan integritas pribadi melalui penolakan kecurangan, peran sebagai pengawas sosial terhadap penyimpangan administrasi, pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi keuangan organisasi, serta kolaborasi awal dengan pihak kampus dalam kampanye integritas. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Strategi ACTION menjadi kerangka yang relevan untuk memperkuat budaya antikorupsi, namun diperlukan dukungan kelembagaan agar praktik integritas dapat terinternalisasi dan dinormalisasi secara berkelanjutan di lingkungan kampus.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Salsabila Fatmawati

Universitas Siliwangi

E-mail: salsabilafatmawati7@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak destruktif bagi berbagai aspek kehidupan bangsa. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga melemahkan struktur sosial, menghambat pembangunan, memperburuk kualitas layanan publik, serta merusak moralitas masyarakat. Korupsi menggerogoti kepercayaan publik, menciptakan ketidaksetaraan, melemahkan hukum, dan menumbuhkan budaya permisif terhadap penyimpangan. Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi membutuhkan pendekatan preventif yang dimulai dari pembentukan karakter dan nilai moral sejak dini, terutama di lingkungan pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berintegritas. Kampus bukan hanya ruang akademik untuk belajar, tetapi juga lingkungan sosial tempat nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan transparansi dibentuk dan diuji. Mahasiswa diposisikan sebagai aktor penting dalam pemberantasan korupsi karena mereka adalah calon pemimpin masa depan sekaligus kelompok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis, keberanian moral, dan daya pengaruh sosial. Dalam berbagai pemikiran, mahasiswa dikenal sebagai *agent of change*, *guardian of value*, *social control*, serta *future leader*, yang berarti bahwa mereka tidak sekadar menjadi penerima pengetahuan, melainkan subjek yang memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan sosial melalui tindakan nyata.

Namun, potensi strategis mahasiswa tidak akan berkembang tanpa lingkungan kampus yang mendukung. Banyak tindakan tidak jujur yang muncul di dunia pendidikan menunjukkan bahwa korupsi berawal dari hal-hal kecil yang dianggap remeh, seperti mencontek, plagiarisme, manipulasi data, mark-up dana organisasi, hingga percaloan dalam proses administrasi. Perilaku ini menjadi bukti bahwa integritas tidak dapat tumbuh secara instan, melainkan perlu dibangun melalui pendidikan, pembiasaan, dan sistem yang menciptakan budaya kejujuran. Karena itu, membangun *ekosistem kampus berintegritas* menjadi langkah penting dalam mencegah tumbuhnya perilaku koruptif sejak awal. Ekosistem kampus berintegritas mencerminkan lingkungan yang menjadikan nilai antikorupsi sebagai budaya hidup. Ekosistem ini mencakup sikap jujur dalam kegiatan akademik, transparansi dalam organisasi mahasiswa,



pengelolaan sumber daya yang akuntabel, serta keberanian untuk mengawasi dan mengkritisi setiap bentuk ketidakjujuran.

Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, dibutuhkan pendekatan yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan kehidupan mahasiswa. Salah satu pendekatan yang tepat adalah Strategi ACTION, sebuah kerangka yang dirancang untuk mengajak mahasiswa menerapkan nilai antikorupsi melalui tindakan konkret. Strategi ACTION terdiri atas enam komponen penting yang saling terhubung. Pertama, *Awasi dan Advokasi*, yang menekankan peran mahasiswa dalam mengawasi proses di kampus serta berani menyuarakan ketidakberesan. Kedua, *Cegah dan Integritas Diri*, yaitu penekanan bahwa pencegahan korupsi dimulai dari kejujuran pribadi dalam hal-hal sederhana. Ketiga, *Teknologi untuk Transparansi*, yang mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk membuka akses informasi dan mencegah praktik manipulatif. Keempat, *Internalize melalui Edukasi Kreatif*, yakni proses internalisasi nilai antikorupsi melalui media edukasi yang menarik dan dekat dengan dunia mahasiswa. Kelima, *Organisasi dan Kolaborasi*, yang menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarorganisasi mahasiswa, dosen, dan pihak kampus. Dan keenam, *Normalisasi Perilaku Antikorupsi*, yaitu upaya menjadikan transparansi dan kejujuran sebagai norma umum yang diterima dan dirayakan dalam kehidupan kampus.

Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep antikorupsi, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Membangun budaya integritas tidak cukup hanya dengan pengetahuan, melainkan dengan tindakan berulang yang kemudian menjadi kebiasaan kolektif. Ketika strategi ACTION diterapkan secara konsisten, kampus dapat berubah menjadi ruang yang sehat, bersih, dan bebas dari praktik ketidakjujuran. Mahasiswa tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral, sehingga mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan prinsip integritas di masa depan. Dengan demikian, kontribusi mahasiswa dalam membangun ekosistem kampus berintegritas menjadi elemen penting dalam pencegahan korupsi jangka panjang. Penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi strategi ACTION tidak hanya mencetak mahasiswa yang jujur, tetapi juga menciptakan budaya kolektif yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang siap memimpin bangsa dengan karakter bersih, beretika, dan memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena fokus kajian terletak pada analisis mendalam mengenai gagasan, nilai, dan konstruksi konseptual terkait kontribusi mahasiswa dalam membangun ekosistem kampus berintegritas melalui pendidikan antikorupsi dan strategi ACTION. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menelusuri makna di balik teori, praktik sosial, serta dinamika yang melingkupi peran mahasiswa sebagai agen kultural dan moral dalam pencegahan korupsi. Penelitian juga dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis, dengan menghimpun berbagai sumber literatur yang relevan, mulai dari buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, undang-undang, laporan penelitian, hingga materi pendidikan antikorupsi yang menggambarkan peran mahasiswa dalam membangun budaya transparansi dan integritas. Pemilihan data dilakukan secara purposif, yaitu menyeleksi hanya referensi yang memiliki hubungan langsung dengan tema korupsi, pendidikan integritas, dan



strategi tindakan mahasiswa, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar mendukung penguatan argumentasi penelitian.

Seluruh sumber yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang memungkinkan peneliti memeriksa struktur argumentatif, pola konsep, serta kecenderungan pemikiran yang muncul dalam wacana antikorupsi. Proses analisis dilakukan melalui tahapan membaca intensif, identifikasi tema-tema kunci, reduksi data, pengelompokan konsep, dan sintesis argumentatif. Melalui proses ini, konsep-konsep seperti integritas diri, kontrol sosial mahasiswa, ekosistem kampus berintegritas, dan strategi ACTION diuji keterkaitannya secara logis dan kontekstual. Analisis isi tidak hanya dipakai untuk mendeskripsikan, tetapi juga untuk menafsirkan bagaimana pendidikan antikorupsi membentuk kesadaran kritis mahasiswa dan bagaimana strategi ACTION menyediakan kerangka operasional yang dapat diterapkan dalam kehidupan kampus. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil penelaahan dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi perspektif, kesesuaian konsep, dan validitas argumentasi. Triangulasi ini menjadi penting karena penelitian bertumpu pada konstruksi pengetahuan yang berasal dari banyak referensi, sehingga akurasi interpretasi harus dijaga agar tidak bersifat subjektif semata. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menghasilkan deskripsi yang komprehensif, tetapi juga memberikan pijakan analitis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi secara substansial dalam membangun budaya antikorupsi melalui penguatan pendidikan karakter dan penerapan strategi ACTION. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan analisis isi memungkinkan penelitian ini menawarkan pandangan yang lebih kritis, reflektif, dan teoritis mengenai peran mahasiswa dalam menciptakan kampus yang bersih, transparan, dan berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa dalam penguatan budaya antikorupsi di lingkungan kampus terwujud dalam empat kategori utama, yaitu integritas pribadi, pengawasan sosial, inisiatif transparansi digital, serta kolaborasi kelembagaan. Pertama, penelitian menemukan bahwa mahasiswa mulai menunjukkan penguatan integritas pribadi dalam kegiatan akademik maupun nonakademik. Data memperlihatkan adanya komitmen mahasiswa untuk tidak melakukan kecurangan akademik, seperti menyontek, melakukan plagiasi, atau memanipulasi data laporan. Pada konteks nonakademik, mahasiswa juga menunjukkan perilaku berintegritas melalui tindakan mengembalikan kelebihan pembayaran dan menolak penggunaan prosedur tidak resmi dalam layanan administrasi kampus. Namun, praktik integritas personal ini masih bersifat individual dan belum berkembang menjadi norma bersama yang diikuti secara konsisten oleh seluruh mahasiswa. Kedua, penelitian menemukan bahwa mahasiswa berperan sebagai pengawas sosial terhadap praktik penyimpangan di lingkungan kampus. Mahasiswa melakukan berbagai bentuk pengawasan, antara lain mempertanyakan rincian penggunaan dana kegiatan, meminta laporan keuangan organisasi, menolak praktik mark-up, dan mengkritisi pungutan liar pada layanan administrasi maupun kegiatan KKN. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa telah menyadari tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya tata kelola kampus. Meskipun



demikian, tingkat partisipasi pengawasan tidak merata dan lebih dominan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Ketiga, penelitian mengidentifikasi adanya inisiatif kolektif mahasiswa dalam mendorong transparansi melalui pemanfaatan teknologi digital. Mahasiswa menyelenggarakan berbagai kampanye antikorupsi, seperti seminar, publikasi poster, produksi video edukasi, serta kampanye melalui media sosial. Selain itu, beberapa organisasi mahasiswa telah menerapkan sistem transparansi keuangan terbuka dengan mempublikasikan laporan pemasukan dan pengeluaran dana secara real-time melalui platform daring. Penerapan teknologi transparansi ini menunjukkan adanya pergeseran menuju tata kelola organisasi yang lebih akuntabel, meskipun belum diterapkan secara menyeluruh di seluruh organisasi mahasiswa. Keempat, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kolaborasi awal antara organisasi mahasiswa dan pihak kampus dalam penguatan budaya integritas. Beberapa kerja sama antara BEM dan UKM teridentifikasi dalam bentuk kegiatan kampanye integritas, meskipun sifatnya masih sporadis dan belum berkelanjutan. Pola kolaborasi ini menggambarkan bahwa upaya membangun jaringan perubahan sudah mulai berkembang tetapi belum mencapai tahap institusional yang stabil. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kontribusi mahasiswa dalam membangun budaya antikorupsi telah tampak melalui penguatan integritas pribadi, praktik pengawasan sosial, inovasi transparansi digital, serta kolaborasi awal dengan pihak kampus. Meskipun demikian, seluruh bentuk kontribusi tersebut masih berada pada tahap perkembangan dan memerlukan penguatan untuk dapat terintegrasi secara sistematis dalam budaya kampus.

Selain empat kategori utama tersebut, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kontribusi mahasiswa dalam penguatan budaya antikorupsi dipengaruhi oleh dinamika lingkungan sosial, efektivitas internalisasi nilai, serta kesiapan sistem kelembagaan kampus. Data memperlihatkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan terlibat dalam program penguatan karakter menunjukkan penerapan nilai integritas yang lebih konsisten dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki keterlibatan serupa. Temuan ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan interaksi organisasi berperan signifikan dalam membentuk orientasi moral dan perilaku antikorupsi mahasiswa. Penelitian juga menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual mengenai nilai antikorupsi dengan praktik nyata dalam kehidupan akademik dan sosial mahasiswa. Meskipun sebagian besar mahasiswa telah memahami prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, implementasinya belum sepenuhnya merata dan masih dipengaruhi oleh budaya permisif yang berkembang dalam kelompok sebaya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses internalisasi nilai antikorupsi belum sepenuhnya optimal dan memerlukan penguatan melalui mekanisme pembiasaan, edukasi berkelanjutan, serta penerapan regulasi kampus yang lebih tegas.

Lebih lanjut, hasil penelitian mengidentifikasi bahwa dukungan kelembagaan kampus dalam mendukung perilaku antikorupsi belum diterapkan secara komprehensif. Ketiadaan sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses, belum adanya standar transparansi keuangan organisasi yang baku, serta kurangnya pembinaan terstruktur terhadap organisasi mahasiswa menjadi faktor penghambat terwujudnya budaya transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian tidak hanya membuktikan adanya kontribusi mahasiswa dalam membangun budaya antikorupsi, tetapi juga menegaskan bahwa efektivitas kontribusi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal mahasiswa maupun sistem eksternal yang menaungi mereka. Dengan demikian, penguatan budaya antikorupsi di lingkungan



kampus membutuhkan integrasi antara inisiatif mahasiswa, dukungan organisasi, dan kebijakan institusional agar mampu berkembang dari tindakan individual menuju budaya kolektif yang terlembaga.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menginterpretasikan temuan penelitian dengan mengaitkannya pada tujuan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, dinamika kehidupan kampus, serta implementasi Strategi ACTION sebagai kerangka penguatan integritas mahasiswa. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa dalam membangun budaya antikorupsi berlangsung melalui proses bertahap yang mencakup internalisasi nilai, ekspansi kesadaran kritis, pembentukan mekanisme transparansi, dan upaya kolaborasi lintas unit kampus. Proses ini menandai bahwa perilaku antikorupsi tidak muncul secara instan, melainkan melalui penguatan nilai individual dan penguatan sistem sosial di lingkungan kampus.

1. Internalisasi Integritas Pribadi Mahasiswa

Temuan mengenai penguatan integritas pribadi memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi mulai memberikan pengaruh nyata terhadap perilaku mahasiswa. Temuan ini relevan dengan komponen *C (Cegah & Integritas Diri)* dalam Strategi ACTION, yang menegaskan bahwa perubahan perilaku antikorupsi harus dimulai dari individu. Penolakan mahasiswa terhadap praktik menyontek, plagiasi, dan manipulasi data bukan hanya tindakan moral individual, tetapi merupakan bentuk resistensi terhadap pola kecurangan yang berpotensi berkembang menjadi praktik koruptif di masa depan. Dalam konteks pendidikan tinggi, integritas pribadi memiliki kedudukan fundamental sebagai prasyarat lahirnya budaya akademik yang sehat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa telah memiliki kesadaran moral yang cukup kuat untuk menolak tindakan tidak etis, namun karakteristiknya masih individual dan belum menjadi kesadaran kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai antikorupsi berjalan, tetapi belum mencapai tahap di mana nilai tersebut diterima sebagai norma sosial yang mengikat seluruh komunitas kampus. Dengan demikian, diperlukan intervensi kelembagaan yang mampu mempercepat proses transformasi nilai dari level individual menuju level komunitas.

2. Pengawasan Sosial sebagai Perwujudan Akuntabilitas Mahasiswa

Temuan mengenai pengawasan sosial menunjukkan adanya pergeseran peran mahasiswa dari sekadar pengguna layanan kampus menjadi aktor aktif yang berpartisipasi dalam menjaga akuntabilitas. Tindakan mahasiswa mempertanyakan detail penggunaan dana kegiatan, meminta laporan keuangan, menolak mark-up, dan mengkritisi pungutan liar sesuai dengan komponen *A (Awasi & Advokasi)* dalam Strategi ACTION. Pengawasan ini menandakan bahwa mahasiswa memahami bahwa praktik korupsi tidak hanya muncul pada level struktural, tetapi juga dapat terjadi pada tingkat mikro di lingkungan kampus. Namun demikian, pola pengawasan mahasiswa masih bersifat reaktif muncul ketika terdapat indikasi ketidakwajaran dan belum terintegrasi dalam sistem pelaporan formal. Ketidadaan mekanisme pelaporan yang jelas membuat tindakan pengawasan sering bergantung pada keberanian personal, bukan pada sistem perlindungan atau dukungan kelembagaan. Kondisi ini



menunjukkan perlunya penguatan sistem whistleblowing kampus agar pengawasan mahasiswa dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

3. Pemanfaatan Teknologi sebagai Mekanisme Transparansi Modern

Penggunaan teknologi digital dalam mendorong transparansi organisasi mahasiswa menunjukkan implementasi nyata dari komponen *T (Teknologi untuk Transparansi)* dan *I (Internalize melalui Edukasi Kreatif)* dalam Strategi ACTION. Publikasi laporan keuangan secara real-time melalui platform digital menciptakan mekanisme pengawasan terbuka yang memperkecil peluang terjadinya penyimpangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan anggota organisasi terhadap pengurus. Inovasi transparansi ini merupakan bentuk modernisasi tata kelola yang tidak hanya relevan di tingkat organisasi mahasiswa, tetapi juga berpotensi direplikasi pada sistem keuangan fakultas maupun unit kegiatan kampus lainnya. Selain itu, kampanye edukatif yang dilakukan melalui poster, video, seminar, dan media sosial menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menginternalisasi nilai antikorupsi melalui pendekatan kreatif yang sesuai dengan budaya generasi muda. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa internalisasi nilai tidak selalu harus menggunakan metode formal, tetapi dapat dilakukan melalui media yang menarik dan interaktif.

4. Kolaborasi sebagai Fondasi Penguatan Budaya Integritas

Temuan mengenai kolaborasi antarmahasiswa dan pihak kampus mengindikasikan bahwa upaya membangun budaya integritas sudah mulai bergerak menuju pendekatan kolektif. Kolaborasi ini relevan dengan komponen *O (Organisasi & Kolaborasi)* dalam Strategi ACTION. Bentuk kolaborasi terlihat melalui penyelenggaraan seminar, kampanye integritas, dan program kegiatan yang melibatkan BEM serta berbagai UKM. Namun, kolaborasi yang dihasilkan masih bersifat jangka pendek dan belum berada pada tahap institusionalisasi. Koordinasi lintas organisasi belum stabil, dan tidak semua unit memiliki komitmen atau kapasitas yang sama dalam melaksanakan program antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi masih berada pada tahap awal pembentukan jaringan perubahan dan perlu diperkuat melalui regulasi, dukungan anggaran, dan pembinaan berkelanjutan dari pihak kampus.

5. Normalisasi Perilaku Antikorupsi sebagai Tahap Akhir Strategi ACTION

Komponen terakhir dalam Strategi ACTION, yaitu *N (Normalisasi Perilaku Antikorupsi)*, menekankan bahwa nilai integritas perlu menjadi kebiasaan yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses menuju normalisasi ini belum stabil. Dalam beberapa kasus, mahasiswa yang menegakkan integritas misalnya meminta laporan keuangan secara rinci atau menolak mencontek justru dianggap “berlebihan” atau tidak loyal oleh teman sekelompok. Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara budaya lama yang permisif terhadap kecurangan dengan nilai baru yang ingin dibangun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi nilai belum sepenuhnya diterima sebagai standar perilaku kolektif. Untuk itu, diperlukan dukungan struktural dari pihak kampus melalui kebijakan integritas, kurikulum antikorupsi, serta sistem penghargaan bagi perilaku berintegritas sehingga nilai antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam budaya kampus.

KESIMPULAN



Penelitian ini menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kontribusi strategis dalam membangun dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa upaya penguatan integritas tidak hanya bergantung pada kebijakan institusi, tetapi juga pada partisipasi aktif mahasiswa sebagai aktor perubahan. Melalui analisis terhadap dokumen, literatur, dan hasil kajian terkait implementasi Strategi ACTION, penelitian ini mengidentifikasi empat bentuk kontribusi utama mahasiswa, yakni integritas pribadi, pengawasan sosial, inisiatif transparansi digital, dan kolaborasi kelembagaan. Pertama, penguatan integritas pribadi tampak pada munculnya kesadaran moral mahasiswa untuk menolak berbagai bentuk kecurangan, baik dalam konteks akademik maupun nonakademik. Perilaku seperti tidak menyontek, menolak plagiasi, menghindari manipulasi data, serta menunjukkan kejujuran dalam proses administrasi kampus menandakan bahwa nilai-nilai antikorupsi telah mulai terinternalisasi dalam diri sebagian mahasiswa. Meskipun demikian, praktik integritas ini masih bersifat individual dan belum berkembang menjadi norma kolektif yang mengikat seluruh komunitas mahasiswa.

Kedua, mahasiswa berperan sebagai pengawas sosial yang memiliki keberanian untuk kritis terhadap penyimpangan yang terjadi dalam tata kelola kampus. Aksi mempertanyakan rincian penggunaan dana, menolak praktik mark-up, serta mengkritisi pungutan liar menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Walaupun demikian, tingkat partisipasi pengawasan masih belum merata dan cenderung terpusat pada kelompok mahasiswa yang memiliki kepedulian lebih tinggi terhadap isu integritas. Ketiga, penelitian ini juga menemukan bahwa mahasiswa mulai menginisiasi praktik transparansi melalui pemanfaatan teknologi digital. Publikasi laporan keuangan organisasi secara terbuka, kampanye edukatif melalui media sosial, serta penggunaan platform digital untuk menyebarluaskan informasi integritas menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju tata kelola organisasi yang lebih modern, akuntabel, dan partisipatif. Namun, praktik ini belum diadopsi secara konsisten oleh seluruh organisasi mahasiswa sehingga diperlukan standarisasi yang lebih jelas.

Keempat, meskipun masih terbatas, telah terdapat upaya kolaboratif antara mahasiswa dan pihak kampus dalam mendorong pembudayaan integritas. Kegiatan seperti seminar, diskusi publik, dan kampanye nilai antikorupsi menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas unit kemahasiswaan dan lembaga kampus mulai terbentuk. Namun, pola kolaborasi ini belum terlembaga secara sistemik sehingga keberlanjutannya masih bergantung pada inisiatif individu atau organisasi tertentu. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi mahasiswa dalam penguatan budaya antikorupsi sudah terlihat secara nyata, tetapi masih berada pada tahap perkembangan awal. Efektivitas kontribusi tersebut sangat ditentukan oleh integrasi antara kesadaran personal, dukungan lingkungan sosial, kesiapan tata kelola organisasi mahasiswa, serta komitmen kelembagaan kampus. Implementasi Strategi ACTION terbukti memberikan kerangka operasional yang komprehensif untuk mengarahkan peran mahasiswa, namun diperlukan penguatan sistemik meliputi penyediaan mekanisme pelaporan yang jelas, penegakan kebijakan integritas yang konsisten, serta pembinaan organisasi mahasiswa yang terstruktur.

Dengan demikian, penguatan budaya antikorupsi di perguruan tinggi membutuhkan sinergi berkelanjutan antara mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan institusi kampus agar



nilai integritas dapat berkembang dari perilaku individual menjadi budaya kolektif yang terinstitusionalisasi, berkelanjutan, dan menjadi identitas moral civitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, Z. N. (2021). Dampak Aplikasi Pendidikan Karakter Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi. *PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik Dan Dinamika Pendidikan*, 9(2), 111–117. <https://doi.org/10.30598/PEDAGOGIKAVOL9ISSUE2PAGE111-117>
- Alkostar, A. (2015). Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime.
- Amelia, K., Larasati, G. E., Putri, V. N., & Rakhmawati, N. A. (2024). Peran Perguruan Tinggi dalam Menjaga Integritas Akademik pada Era Digital. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(3), 13–26. <https://doi.org/10.59581/JUSIIK-WIDYAKARYA.V2I3.3287>
- Anwar, R. A. R. H. (2019). Peran Pimpinan Dalam Memberdayakan Tenaga Pendidik Untuk Membangun Good University Governance. *Dialektikal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 135–149. <https://www.scribd.com/document/680165191/JURNAL-5>
- Ayuningtyas, D. (2020). Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 93–107. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.375>
- Bhandesa, A. M., Sudarsana, I. M., Susanta, I. P. A. E., Sutrisna, I. P. G., Putra, I. B. A., & Masri, K. A. (2023). Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 411–425. <https://doi.org/10.37329/CETTA.V6I2.2464>
- Burhanudin, A. A. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Penanaman Dan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(4), 137-149.
- Fadhil, M. (2019). Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, 2(1), 44–60. <http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/>
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia : Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278–297. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874>
- Fitriani, S., & Muljono, H. (2019). Beyond Good Governance: An Ultimate Key Success for Higher Education Quality. *Journal of Education, Teaching and Learning*, 4(1), 210–216.
- Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.621>
- Karim, A. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *JPeHI-Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 4(2), 25–49.
- Kholid, I., Rahayu, R., Fathony, M. H., & Anwar, R. (2025). Strategi dan tantangan integrasi nilai antikorupsi dalam Kurikulum Merdeka: kajian sistematik literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(2), 487-497.
- Kholiq, A., & Permata, K. I. (2023). Anticorruption Education Ecosystems at State Islamic Universities in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 283–292. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V9I2.950>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi (1st ed.). Direktorat Jejaring Pendidikan.



- Muammar, M., & Taufik, I. (2023). Ambiguitas Norma Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 62–77. <https://doi.org/10.59001/PJLS.V2I1.80>
- Muka, T., Glisic, M., Milic, J., Verhoog, S., Bohlius, J., Bramer, W., Chowdhury, R., & Franco, O. H. (2020). A 24-Step Guide On How To Design, Conduct, And Successfully Publish a Systematic Review And Meta-analysis On Medical Research. *European Journal of Epidemiology*, 35(1), 49–60. <https://doi.org/10.1007/S10654-019-00576-5/METRICS>
- Perdana, N. S. (2018). Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2), 183–191. <https://doi.org/10.24176/RE.V8I2.2358>
- Permatasari, M., Handayani, T., & Budiono, B. (2019). Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Membentuk Good Citizen Pada Era Milenial. *Jurnal Civic Hukum*, 4(1), 20–28. <https://doi.org/10.22219/JCH.V4I1.9893>
- Risanty, R., & Kesuma, S. A. (2019). Good University Governance: Experience from Indonesian University. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 515–524. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i4.6195>
- Salahudin, Nurmandi, A., Fajar, M., Mutiarin, D., Siregar, B., Sulistyaningsih, T., Jainuri, Agusta, R., & Karinda, K. (2019). Developing Integrity University Governance Model in Indonesia. *International Journal of Higher Education*, 8(5), 185–199. <https://doi.org/10.5430/IJHE.V8N5P185>
- Siregar, P. J. W. S., & Tirta, N. (2020). Implementasi Stimulan Reward and Punishment pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 153–168. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.634>
- Sjafrina, A. G. P., & Anggraeni, D. (2021). Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi. <https://antikorupsi.org/id/tren>
- Wijaya, A. (2025). Peran Kampus dalam Membentuk Generasi Berintegritas dan Anti Korupsi. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1(2), 97-110.
- Zulaiha, A. R., & Munir, M. (2025). Systematic Literature Review: Pengarusutamaan Antikorupsi melalui Kurikulum Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Tinggi. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(2), 149-170.